

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah permasalahan yang wajib untuk pembangunan bangsa dan negara. Untuk membangun sebuah negara yang saat ini sementara berkembang tentu bangsa Indonesia membutuhkan sebuah pendidikan yang berkualitas agar dapat menjadi bangsa yang maju. Sebagai mana yang di kemukakan oleh Micheel Rutz pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan. Pendidikan merupakan jawaban untuk membuat manusia menjadi lengkap. Karena setiap pribadi selalu mempunyai defisit maka, pendidikan adalah suatu proses kompensatoris yang dapat membantu anak didik untuk sedapat dapatnya menutupi defisit tersebut (Nugroho, 2008: 20). Sedangkan menurut Plato (1990) pendidikan adalah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan (Mu'azizah, *et all.* 2013: 3).

Dewasa ini bangsa Indonesia dipertemukan dengan persoalan persaingan ilmu pengetahuan yang mana sedang melanda seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Bangsa Indonesia harus melakukan dan berupaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang diharapkan yang bisa berdampak positif bagi pembangunan bangsa ini.

Tilaar mendefinisikan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Lantip Diat Prasajo: 2008:139). Sehingga lembaga pendidikan bersama pemerintah adalah sebuah harapan besar bagi negeri ini untuk bisa membangkitkan keterpurukan pendidikan yang melanda bangsa saat ini sebab, kedua lembaga ini adalah pemegang kebijakan tersebut.

Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini mengalami yang namanya degradasi moral hal ini dapat di lihat berbagi persoalan dan dinamika yang terjadi

di bangsa ini. Sehingga masalah pendidikan yang terjadi saat ini bukan hanya persoalan kualitas ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga adalah persoalan karakter individu yang mendapatkan suplay ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan pembinaan karakter terhadap setiap individu yang mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Karakter adalah sebuah penyakit yang menyelimuti setiap individu yang berpengetahuan atau berilmu tinggi yang ada di bangsa Indonesia saat ini. Hal ini dapat dengan dibuktikan realita sosial yang terjadi saat ini di mana korupsi yang merajalela pelakunya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan serta status sosial yang tinggi di mata masyarakat, tentunya ini adalah merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat. Orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang tinggi namun karakternya yang bobrok sama saja dengan orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Sehingga di sinilah dibutuhkan sentuhan dari pada lembaga pendidikan itu sendiri, lebih khususnya pada tenaga pendidik atau guru, apa lagi pada guru PPkn sebab guru PPkn adalah guru yang mengajar serta mentransfer ilmu pengetahuannya kepada setiap siswa yang ada muatan etika dan moral di dalamnya yang ke semuanya terangkum dalam pendidikan karakter. sebagaimana yang di jelaskan pada, UUD 1945 BAB XIII pasal 31 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

1. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang – undang
2. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Ade Candra 2008 : 37).

Melihat apa yang di jelaskan pada ayat 3 adalah tujuannya semata mata untuk pembentukan karakter dari pada peserta didik itu sendiri. Sehingga hal ini perlu di implementasikan dalam proses belajar dan mengajar itu sendiri, baik itu secara intrakurikuler ataupun secara ekstrakurikuler. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan sentuhan dari pada lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dinas

pendidikan selaku pendorong atau tumpuan dari pada tenaga pendidik atau guru yang menjadi ujung tombak dari pembentukan karakter siswa itu sendiri.

Sebagaimana yang di katakana oleh Rahmat, guru adalah figur panutan. Apa yang terefleksikan dari perilaku guru akan menjadi contoh dan bahkan pada situasi tertentu akan membekas dalam ingatan murid. Karena itulah di lingkungan pendidikan Indonesia , kita mengenal istilah jawa guru diguguh dan ditiru. Bahkan dalam kata bijak juga di temukan ungkapan guru kencing berdiri murid kencing berlari. Mengapa demikian, alasanya adalah keberadaan guru merupakan panutan penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seorang murid (Abdul Rahmat, 2010 : 159). Melihat apa yang di jelaskan dalam teori ini adalah guru merupakan sebuah patron dari penmbentukan karakter siswa sehingga untuk membentuk karakter sisiwa maka haruslah butuh kerja ekstra dari guru itu sendri, dan membentuk karakter sisiwa itu sendiri guru haruslah mendapatkan rangsangan ataupun petunjuk serta dorongan dari instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pendidikan itu sendiri, dalam hal ini adalah dinas pendidikan.

Untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas maka di perlukan profesionalisme serta kinerja yang maksimal dari seorang guru. Guru adalah suatu profesi sehingga harus ada kemampuan khusus yang di miliki dan di jadikan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan (Hariyanto Katjo, 2013:2). sedangkan Kinerja atau yang lebih populis dikenal dengan kata *performance* diartikan oleh para cendekiawan sebagai ”penampilan”, ”unjuk kerja”, atau ”prestasi”. Istilah ini dalam Kamus Illustrated Oxford Dictionary.

Pada umumnya sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang lebih menekankan pada kreativitas dan keahlian sisiwa itu sendiri dalam mendalami keilmuannya sehingga, ketika sisiwa tersebut lulus nanti sudah siap masuk dalam lapangan kerja sesuai dengan keahlian ilmunya. Semetera penekan pada sikap dan karekter siswa itu sendiri lebih di anggap sepele atau bukan prioritas. Schippers mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan non akademis yang berorientasi pada praktek-praktek dalam bidang pertukangan, bisnis, industri, pertanian, transportasi, pelayanan jasa, dan sebagainya (Nasrul Alpansa,

2012 : 3). Kemudian hal ini juga lebih di pertegas pada Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu(Nasrul Alpansa, 2012: 3)

Dari penjabaran di atas peneliti melihat permasalahan ini kedalam perspektif wilayah yang terjadi di sebuah sekolah SMK N 1 Boalemo. SMK N 1 Boalemo adalah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di kabupaten Boalemo. Smk ini letaknya tepat berada di pusat kota kabupaten Boalemo, Kecamatan Tilamuta, Desa Ayuhulalo. Namun ada hal menarik dan yang berbeda dari SMK N I Boalemo ini dari apa yang di jelaskan pada pengertian ataupun tujuan SMK itu sendiri. Peneliti melihat pada beberapa tahun kemarin SMK ini mengalami perubahan dari smk yang biasanya. Sekolah dulunya di kenal sebagai sekolah yang karakter serta sikap siswa siswinya yang sangatlah tidak baik. Namun belakangan mengalami perubahan sikap serta karakter yang baik. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah ini.

Serta peneliti ingin melihat seberapa besar peran Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dalam mendorong kinerja guru pada pembentukan karakter siswa siswi di SMK N 1 Boalemo ini, sebagai mana yang menjadi visi misi dari pada dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo itu sendiri yaitu,

Visi

terselenggaranya pelayanan prima pendidikan untuk membentuk insan cerdas, produktif, kompetitif, dan berwawasan global.

Misi

- 1) Meningkatkan layanan prima pada semua jenjang dan lembaga kependidikan
- 2) Meningkatkan dan kualitas dan relevansi pendidikan
- 3) Mengembangkan pendidikan enterpreneur ship dan kerja sama ke lembagaan
- 4) Mewujudkan insan berkarakter yang memiliki ke unggulan dan daya saing

5) Mengembangkan pendidikan yang berbasis informasi teknologi

Dari penjelasan di atas Maka peneliti perlu di lakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pendidikan Dalam meningkatkan kinerja guru pada Pembentukan Karakter Siswa Yang Ada Di SMK N 1 Boalemo”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Sejauh mana peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerjaguru terhadap pembentukan karakter siswa yang ada di SMK N 1Boalemo.
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh dinas pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru terhadap pembedukan karakter siswa di SMK N 1 Boalemo

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas pendidikan dalam meniggkatkan kinerja guru pada pembentukan karakter siswa di SMK N 1 Boalemo?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi oleh dinas pendidikan Boalemo dalam meningkatkan kinerja guru terhadap pembentukan karakter siswa? Serta bagaimana solusinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dinas pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru pada pembentukan karakter siswa yang ada di SMK N 1 Boalemo.

1.5 Manfaat Peneltian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teori yakni tentang peran dinas pendidikan dan pemerintah daerah dalam meniggkatkan kinerja guru terhadap pembentukan karakter siswa yang ada di Smk 1 Boalemo

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberi kn kontribusi serta bahan kajian terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja guru terhadap pembentukan karakter siswa yang ada di SMK 1 Boalemo